

Kata Pengantar v

Daftar Isi ix

Bab 1 Uang dan Kegiatan Ekonomi 1

Pendahuluan 1

Pengertian Uang 2

Definisi Uang Dilihat Dari Aspek Hukum 4

Definisi Uang Dilihat dari Aspek Fungsi 5

Uang: Dulu, Sekarang dan Masa Mendatang 6

Kriteria Uang 6

Acceptability (Disukai Oleh Umum) 7

Stability of Value (Mempunyai Nilai Yang Stabil) 7

Elasticity of Supply 7

Portability, (Mudah Diangkut) 7

Durability, (Tidak Mudah Rusak) 8

Divisibility, (Mudah Dibagi-Bagi) 8

Fungsi-Fungsi Uang 8

Alat Kesatuan Hitung (Unit of Account) 9

Alat Pertukaran (Medium of Exchange) 10

Alat Penyimpan Kekayaan (Store of Value) 11

Standard Pembayaran Masa Depan (Standard For Deferred Payment) 12

Jenis dan Klasifikasi Uang 12

Berdasarkan Material 13

Berdasarkan Nilainya 13

Berdasarkan Lembaga Yang Menciptakannya 14

Berdasarkan Wilayah Berlakunya Uang 14

Peranan Uang Dalam Perekonomian 15

Bagaimana Mengenal Uang Anda 17

Uang Rupiah Indonesia (IDR) 17

Standard Kualitas Uang Rupiah 24

Kriteria Rupiah Layak Edur (LE) dan Rupiah Tidak Layak Edur (TLE) 25

Uang Rupiah Yang Dicabut dan Dapat Ditukarkan Kembali 26

Uang Rupiah Yang Dicabut dan Dapat Ditukarkan Kembali Hanya di Bank Indonesia 26

Penukaran Rupiah Tidak Layak Edur 29

Ciri-Ciri Uang Rupiah Palsu 30

Jenis Yang Berbahaya 30

Dollar Amerika Serikat (USD) 31

Ciri-Ciri Uang Dollar Amerika (US \$) Asli 31

Ciri-Ciri Dollar Amerika (US \$) Palsu 31

Modus Operandi Pengedaran Uang Palsu 32

Sumber Uang Palsu Di Dalam Negeri 32

Motivasi dan Dampak Pemalsuan Uang 32

Penanggulangan Masalah Pemalsuan Uang Di Indonesia 32

Dasar Hukum 33	
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Pasal-LX 33	
Koordinasi Antar Instansi (botasupal) 33	
Kepolisian 33	
Interpol 33	
Kejaksaan 33	
Bank Sentral (Bank Indonesia) 33	
Perum Peruri 33	
Assistensi Laboratorium 34	
Pencegahan Kejahatan Pemalsuan Uang 34	
Sekilas Tentang Teori Hakikat Uang 34	
Bab 2 Uang Beredar, Inflasi dan Kebijakan Moneter 37	
<hr/>	
Uang Beredar 37	
Uang Beredar, Uang Kuasi dan Likuiditas Perekonomian 37	
Laju Pertumbuhan dan Posisi Uang Beredar 39	
Faktor yang Mempengaruhi Uang Beredar 40	
Rasio M_1 dan Uang Kuasi Terhadap M_2 42	
Uang Primer, Faktor yang Mempengaruhi dan Koefisien Likuiditas 43	
Peredaran Uang dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi 43	
Perkembangan Uang Beredar 44	
Komponen Uang Beredar 45	
Faktor Yang Mempengaruhi Uang Beredar 48	
Inflasi 53	
Defenisi Inflasi 53	
Inflasi Sebagai Konsep Teori 54	
Teori Kuantitas 54	
Teori Keynes 55	
Teori Strukturalis 55	
Pengelompokan Inflasi 56	
Menurut Parah Tiduknya Inflasi: 57	
Menurut Penyebab dari Inflasi 57	
Menurut Asal-usul Inflasi 59	
Menurut Sifat Inflasi 59	
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 60	
Beberapa Implikasi Inflasi 61	
Dampak Inflasi Terhadap Pendapatan 61	
Dampak Inflasi Terhadap Ekspor 61	
	Dampak Inflasi terhadap Minat Masyarakat untuk Menabung 62
	Dampak Inflasi Terhadap Sektor Riil 62
	Determinan Inflasi 64
	Koordinasi Pengendalian Inflasi 65
	Tentang Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) 65
	Tugas dan Fungsi 66
	Susunan Keanggotaan 67
	Program/Agenda Kerja 67
	Tentang Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 68
	Tugas dan Fungsi 69
	Susunan Keanggotaan 69
	Mekanisme Kerja dan Program Kerja 69
	Koordinasi Pengendalian Inflasi 70
	Kebijakan Moneter 72
	Kebijakan Moneter Suatu Konsep Teoritik 72
	Defenisi dan Klasifikasi Kebijakan Moneter 72
	Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia 72
	Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia 73
	Operasi Moneter oleh Bank Indonesia 75
	Bagaimana Bekerjanya Kebijakan Moneter? 77
	Penyempurnaan Inflation Targeting Framework (Flexible ITF) 78
	Instrumen Operasi Moneter 82
	Operasi Moneter Pasar Terbuka 82
	Operasi Moneter: Syariah 83
	Proyeksi Likuiditas 84
	Penyempurnaan Operasi Moneter 84
	Perpanjangan Profil Jatuh Waktu Sertifikat Bank Indonesia 84
	Perpanjangan Profil-Sertifikat Bank Indonesia (PP-SBI) Dilakukan dengan Tujuan 85
	Lelang SBI Dapat Memiliki Tenor Diluar Kebiasaan 86
	Paket Kebijakan Penguatan Manajemen Moneter dan Pengembangan Pasar Keuangan 87
	Transparansi dan Komunikasi 88
	Statement Kebijakan Moneter 88

Bab 3 Lembaga Keuangan, dan Stabilitas Keuangan 91

A. Lembaga Keuangan 91

Pengertian dan Klasifikasi Lembaga Keuangan 91

- Perantara (The Intermediation Role)* 92
- Pembayar (The Payments Role)* 92
- Penjamin (The Guarantor Role)* 93
- Wakil (The Agency Role)* 93
- Kebijakan (The Policy Role)* 93
- Pengalihan Aset (Asset Transmutation)* 93
- Realokasi Pendapatan (Income Reallocation)* 94
- Transaksi (Transaction)* 94

B. Stabilitas Keuangan 97

Apa Yang Dimaksud Stabilitas Sistem Keuangan 98

Faktor-Faktor Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan 98

Perbedaan Stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan 98

Mengapa Stabilitas Sistem Keuangan Itu Penting 99

Pihak-Pihak Yang Bertanggung jawab Terhadap SSK 101

Peran Bank Sentral Dalam SSK 101

Stabilitas Keuangan Sebagai Tujuan Eksplisit Bank

Sentral di Beberapa Negara 102

Bank of Canada 102

Bank of England (BOE) 102

Bank of Japan (BoJ) 103

European Central Bank (ECB) 103

Reserves Bank of New Zealand (RBNZ) 103

Dua Pendekatan: Makroprudensial dan

Mikroprudensial 103

Peran Bank Indonesia Dalam Memelihara SSK 104

Strategi 1. Pemantapan Regulasi dan Standar dan Disiplin Pasar. 104

Strategi 2. Peningkatan Riset dan Surveillance 105

Strategi 3. Peningkatan Koordinasi dan

Kerjasama. 107

Strategi 4. Penetapan Jaring Pengaman dan Krisis

Menejemen. 108

Apa Yang Telah Bank Indonesia Lakukan 108

Tahun 2003 108

Tahun 2004 109

Tahun 2005 110

Tahun 2006 110

Tantangan ke Depan 110

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran 111

Bab 4 Bank Sentral 115

Sejarah Bank Indonesia 115

Kelembagaan 115

Moneter 116

Perbankan 116

Sistem Pembayaran 117

Dewan Gubernur Bank Indonesia 118

Larangan Bagi Anggota Dewan Gubernur 119

Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dewan

Gubernur 119

Rapat Dewan Gubernur 120

Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan

Gubernur 120

Pengambilan Keputusan Bank Indonesia 121

Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga

Negara 121

Hubungan Bank Indonesia Dengan Pemerintah:

Hubungan Keuangan 122

Hubungan Bank Indonesia Dengan Pemerintah:

Independensi Dalam Interdependensi 122

Kerjasama Bank Indonesia Dengan Lembaga

Lain 122

Struktur Organisasi Bank Indonesia 123

Hubungan Kerjasama Internasional Yang Dilakukan

Bank Indonesia 124

Status dan Kedudukan Bank Indonesia 126

Lembaga Negara Yang Independen 126

Sebagai Badan Hukum 128

Kedudukan Bank Indonesia Dalam Struktur

Ketatanegaraan RI 128

Esensi dan Implikasi dari Status dan Kedudukan

Bank Indonesia 128

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia 129

Tujuan Bank Indonesia 129

Tugas Bank Indonesia 129

Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan

Moneter 129

Peran Bank Indonesia Sebagai Lender of The Last

Resort 130

Kebijakan Nilai Tukar 130



<i>Kewenangan Dalam Mengelola Cadangan Devisa</i>	131
<i>Penyelenggaraan Survei</i>	131
Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	131
<i>Pengaturan Dan Penyelenggaraan Kliring Serta Penyelesaian Akhir Transaksi</i>	132
<i>Mengeluarkan Dan Mengedarkan Uang</i>	132
Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank	132
<i>Pengalihan Tugas Pengawasan Bank</i>	133
Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi	134
Kerangka Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (OPT)	138
Operasi Pasar Terbuka	139
<i>Definisi Operasi Pasar Terbuka</i>	139
<i>Pencapaian Target Operasi Pasar Terbuka</i>	139
<i>Instrumen Operasi Pasar Terbuka</i>	139
<i>Fasilitas Pendanaan</i>	144
<i>Sarana Pendukung Operasi Pasar Terbuka</i>	144
Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan	146
Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan	148
<i>Misi dan Tujuan</i>	148
<i>Strategi</i>	149
<i>Pencegahan Krisis</i>	150
<i>Manajemen Krisis</i>	150
Daftar Bank Sentral Dunia	151
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	153
<i>Misi dan Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i>	153
<i>Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i>	153
<i>Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i>	154
<i>Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i>	154
<i>Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i>	154
Pengalihan Fungsi Perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	155
<i>Latar Belakang Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan</i>	155
<i>Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i>	155
<i>Pembentukan Tim Transisi</i>	156
<i>Pengawasan Terintegrasi</i>	156

Bab 5 Kliring Bank Indonesia 159

<i>Kliring di Indonesia</i>	159
<i>Sekilas Sejarah Kliring di Indonesia</i>	162
<i>Kegiatan-Kegiatan Dalam Kliring</i>	164
<i>Sistem Kliring</i>	166
<i>Sistem Manual</i>	167
<i>Sistem Semi Otomasi (SOKL)</i>	168
<i>Kriteria SOKL</i>	168
<i>Keuntungan Penyelenggaraan Kliring SOKL</i>	169
<i>Sistem Otomasi</i>	169
<i>Kegiatan Kliring Otomasi</i>	171
<i>Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)</i>	175
<i>Prinsip Umum SKNBI</i>	175
<i>Karakteristik SKNBI</i>	176
<i>Warkat, Dokumen Kliring, DKE dan Pencetakan Warkat</i>	182
<i>Warkat</i>	182
<i>Jenis Warkat Kliring</i>	182
<i>Dokumen Kliring</i>	188
<i>Penyelenggara Kliring</i>	191
<i>Bank Indonesia Sebagai Penyelenggara Kliring</i>	192
<i>Pihak Lain Sebagai Penyelenggara Kliring (Bank)</i>	192
<i>Biaya Kliring</i>	193
<i>Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring Non SKNBI</i>	193
<i>Biaya Kliring pada Penyelenggaraan Kliring SKNBI</i>	195
<i>Jadwal Kliring</i>	197
<i>Daftar Hitam</i>	198
<i>Pendahuluan</i>	198
<i>Jenis Alasan Penolakan Cek/Bilyet Giro (BG)</i>	199
<i>Kriteria Penutupan Rekening</i>	201
<i>Penatausahaan Daftar Hitam</i>	201

Bab 6 Bank Umum 203

<i>Pengertian dan Fungsi Bank Umum</i>	203
<i>Agent of Trust</i>	205
<i>Agent of Development</i>	205
<i>Agent of Service</i>	206
<i>Pengelompokan Bank Umum</i>	206
<i>Dilihat dari Aspek Fungsi</i>	206
<i>Dilihat dari Status Kepemilikan</i>	207

<i>Dilihat dari Kegiatan Operasional</i>	207	<i>Tata Cara Perhitungan GWM Sekunder Dalam Rupiah</i>	230
<i>Dilihat Berdasarkan Penciptaan Uang Giral</i>	208	<i>Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)</i>	232
<i>Dilihat Berdasarkan Sistem Organisasi</i>	208	<i>Transparansi Kondisi Keuangan Bank Bank Umum</i>	233
<i>Dilihat Menurut Skala Usaha Atau Turget Pasar</i>	211	<i>Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah</i>	233
<i>Menurut Geografis</i>	211	<i>Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum</i>	234
Risiko-Risiko dalam Usaha Perbankan	212	<i>Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum</i>	235
<i>Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)</i>	213	<i>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</i>	235
<i>Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk)</i>	213	Perkembangan Perbankan	236
<i>Risiko Kredit (Credit Risk)</i>	213	<i>Aktiva (Assets Management)</i>	237
<i>Risiko (Management Risk)</i>	213	<i>Pasiva (Liability Management)</i>	237
<i>Risiko Investasi (Investment Risk)</i>	213	<i>Neraca (Balance Sheet Management)</i>	238
<i>Risiko Operasi (Operating Risk)</i>	213	Penyesuaian Organisasi Perbankan	238
<i>Risiko Fidusia (Fiduciary Risk)</i>	214	<i>Organisasi Yang Berorientasi Produk</i>	238
<i>Risiko Keamanan (Solvency Risk)</i>	214	<i>Organisasi Yang Berorientasi Nasabah</i>	238
<i>Risiko Pendapatan (Earning Risk)</i>	214	Manajemen Kantor Cabang	241
<i>Risiko Pasar (Market Risk)</i>	214	<i>Mengapa Suatu Cabang Didirikan</i>	241
Jenis-jenis Kantor Bank	214	<i>Ada Beberapa Alasan Untuk Membuka Suatu Cabang</i>	241
<i>Kantor Pusat Non-Operasional (KPNO)</i>	214	Pro dan Kontra Dalam Pengembangan Jaringan Cabang	242
<i>Kantor Pusat Operasional (KPO)</i>	214	Sistem Perbankan di Indonesia	243
<i>Kantor Cabang</i>	215	<i>Pertama</i>	243
<i>Kantor Cabang Pembantu</i>	215	<i>Kedua</i>	244
<i>Kantor Perwakilan</i>	215	<i>Ketiga</i>	244
<i>Kantor Perwakilan Bank Asing</i>	215	Strategi Pengembangan Jaringan Kantor Cabang	244
<i>Kantor Kas</i>	215	<i>Cabang Penuh</i>	245
<i>Kas Mobil</i>	215	<i>Kantor Cabang Pembantu</i>	245
<i>Kas Terapung</i>	215	<i>Kantor Cabang Keliling</i>	245
Bank Umum dalam Sistem Perbankan Indonesia	215	<i>Kantor Agen</i>	245
Perkembangan Perbankan	217	Jenis Saluran Distribusi Lainnya	246
<i>Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank</i>	217	Pertimbangan Dasar Dalam Merumuskan Strategi Pengembangan Jaringan Kantor Cabang	247
<i>Perkembangan Dana dan Kredit Bank</i>	219	Pola Pengelolaan Jaringan Kantor Cabang	249
Ketentuan Kehati-hatian Bank Umum		Konsep Biaya Marjinal	251
<i>Konvensional</i>	222	Tantangan Manajemen Bank Umum Dalam Mengembangkan Sistem Informasi	252
<i>Modal Inti Bank Umum</i>	222	<i>Tahap-I (Initial)</i>	253
<i>Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Ketentuan KPMM bagi Bank Umum Konvensional</i>	223		
<i>Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)</i>	224		
<i>Kualitas Aktiva Bank Umum</i>	225		
<i>Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)</i>	226		
<i>Restrukturisasi Kredit</i>	226		
<i>Giro Wajib Minimum (GWM)</i>	227		
<i>Contoh Perhitungan GWM Dalam Rupiah</i>	227		
<i>Contoh Perhitungan Sanksi</i>	229		

Tahap-II (Expansion) 253	Surat Perintah Pembayaran Lainnya 282
Tahap-III (Control) 253	Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) 285
Tahap-IV (Integration) 253	Kredit (Loan) 286
Tahap-V, (Data Administration) 253	Pengertian Kredit 287
Tahap-VI (Maturity) 254	Definisi Kredit Menurut Dasar Kata 289
Dampak Teknologi Terhadap Organisasi	Klasifikasi Kredit 290
Perbankan 255	Menurut Jangka Waktu 290
Rancang Bangun Teknologi Proses Informasi 255	Menurut Tujuan 291
Sentralisasi Proses Informasi (Centralized Processing) 255	Menurut Bentuk Jaminan 291
Distribusi Proses Informasi (Distributed Processing) 256	Menurut Penggunaannya 291
Desentralisasi Proses Informasi (Decentralized Processing) 257	The Six C's of Credit 292
Pemilihan Rancang Bangun Sistem Informasi 258	Character (Kepribadian) 293
Bab 7 Usaha Pokok Bank Umum 261	Capacity atau Ability To Pay (Kemampuan Membayar) 293
Tabungan (Saving Deposit) 261	Capital (Modal Calon Debitur) 294
Perhitungan Bunga Tabungan 262	Condition of Economy (Kondisi Ekonomi Suatu Negara) 294
Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Bunga Harian 263	Collateral (Jaminan) 294
Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Rata-Rata 263	Kredit Sebagai Usaha Pokok Perbankan 295
Sedangkan Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Terendah 264	Kebijaksanaan Umum 295
Tugas-tugas Bagian Tabungan 264	Kebijakan Tahunan 296
Menerima Setoran Tunai atau Cek atau Bilyet Giro Cabang Sendiri. 264	Penyusunan Target Pasar 297
Tabunganku 266	Strategi Pemasaran 297
Definisi Produk Tabunganku 266	Anggaran 297
Fitur Produk Tabunganku 266	Ketentuan Mengenai Harga 297
Simpanan Deposito (Saving Deposit) 269	Perkembangan Kredit Perbankan 298
Deposito Berjangka (Time Deposit) 270	Masalah Penilaian Perkreditan 303
Deposito Harian (Deposit on call) 272	Tujuan dari Penggunaan Kredit. 303
Sertifikat Deposito (Certificate of Deposit) 273	Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Suatu Negara 304
Manfaat Penempatan Dana Deposito 274	Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan (Calon Debitor) 304
Keuntungan Bagi Bank 274	Kemampuan Perusahaan dalam Mengembalikan Kredit dan Bunga yang Diperhitungkan Tepat Pada Waktunya 303
Keuntungan Bagi Nasabah 276	Kemungkinan Pelaksanaan Pengawasan Atas Penggunaan Kredit Yang Diberikan 304
Jasa Giro (Demand Deposit) 276	Riwayat Hidup Calon Debitur 304
Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Giro 277	Ketergantungan Perusahaan Terhadap Jasa Konsultan 305
Instrumen Yang Digunakan Untuk Menarik Dana Giro 278	Keterbukaan Atau Kejujuran Calon Debitur 305
1. Cek (Cheque) 278	Adanya Keinginan Dari Debitur Untuk Mempercepat Proses Pemutusan Kredit 305
2. Bilyet Giro 282	

Permohonan Atau Pemberian Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Sesungguhnya	306	Jenis Kartu Kredit	328
Persoalan Manajemen	306	Wilayah Berlaku	328
Kondisi dan Potensi Perusahaan	306	Cara Pembayaran	328
Fungsi Kredit Bank	307	Pihak-pihak yang Terlibat dalam Kartu Kredit	329
Meningkatkan Daya Guna Dari Uang	307	Mekanisme Transaksi Dengan Kartu Kredit	329
Meningkatkan Daya Guna Dari Barang	307	Manfaat Kartu Kredit	330
Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi	307	1. Bagi Pemegang Kartu Kredit	330
Meningkatkan Kegairahan Usaha Masyarakat	308	2. Bagi Penerima Transaksi Kartu Kredit Atau Pedagang	331
Meningkatkan Pendapatan Nasional	308	3. Bagi Bank Penerbit Kartu Kredit	331
Meningkatkan Hubungan Internasional	308	Ketentuan Umum Bagi Pemegang Kartu Kredit	333
Tujuan Pengawasan Kredit	308	Individu atau Perorangan	333
Proses Pengawasan Kredit	310	Pedagang atau Pengusaha	333
Menetapkan Kriteria Pengawasan	310	Mekanisme Penerbitan, Pelayanan dan Penagihan Kartu Kredit	333
Menetapkan Standar Pengawasan	311	Mitigasi Risiko Kartu Kredit	334
Melakukan Usaha-Usaha Preventif	311	Automatic Teller Machine (ATM)	335
Melakukan Proses Penilaian	311	Beberapa Jaringan Automatic Teller Machine (ATM)	336
Metoda Pengawasan Kredit	311	Off Line	336
Sales Request for Credit Information	312	Stand Alone	336
Customer-Supplied Information	312	On line (ATM integrated)	336
Informasi Bank	312	ATM Sharing	337
Informasi Dunia Perdagangan (Trade Information)	312	Electronic Fund Transfer System (EFTS)	337
Credit Interchange Bureaus	313	Full Teller System	337
Industry Credit Groups	313	Jenis Mesin ATM	338
Credit Reporting Agencise	313	ATM Mesin	338
Direct Interchange	314	ATM Non Tunai	338
Other Sources of Credit Information	314	Drive Thru	339
Sistem Monitoring	314	Manfaat ATM	339
Cara-cara Perhitungan Bunga Kredit	317	Perkembangan Kartu ATM dan Kartu Debet	340
Metode Efektif atau metoda Sliding	317	Kasus Fraud Pada Kartu ATM dan ATM/Debet	343
Metode Anuitas	318	Inkaso (Collection Order)	344
Metode Flat	319	Prosedur Inkaso Dalam Negeri	345
Hal-hal Yang Perlu Diketahui	319	Garansi Bank (Guarantee Bank)	345
Bab 8 Usaha Bank Umum Lainnya	321	Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Bagi Penerima Bank Garansi	348
Transfer (Payment Order)	321	Bagi Pihak Yang Dijamin Bank Garansi	348
Pengertian	324	Kotak Pengaman (Safety Deposit Box)	348
Tujuan BI-RTGS	324	Peralatan Penunjang Safe Deposit Box	351
Mekanisme Settlement Saat Ini	324	Vault Door	351
Risiko-Risiko Sistem Pembayaran	325	Time Lock	352
Karakteristik Sistem BI-RTGS	326	Emergency Vault Ventilator	352
Kartu Kredit (Credit Card)	326	Automatic Fire Detector	352

- Hak dan Tanggung Jawab Bank 352
- Upaya Bank Dalam Menarik Minat Nasabah Safe Deposit Box 353
- Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Safe Deposit Box 353
- Alternatif Pemecahan Hambatan 353
- Cek Perjalanan (*Travellers Cheque*) 354
- Pihak-pihak dalam *Travellers Cheque* 355
- Keuntungan yang Diterima oleh Pelaku *Travellers Cheque* 355
- Prosedur Penjualan *Travellers Cheque* 356
- Prosedur Pembelian *Travellers Cheque* 356
- Kredit Dokumenter (*Documentary Letter of Credit*) 358
- Pengertian 358
- Manfaat *Letter of Credit* 359
- Fungsi *Letter of Credit* 359
- Pihak-pihak yang Terlibat dalam *Letter of Credit* 360
- Jenis-jenis *Letter of Credit* 361
- Letter of credit* Menurut Sifatnya 361
- Letter of credit* Menurut jangka Waktu Pembayaran 361
- Letter of credit* Menurut Bank Yang Menegosiasi 365
- Electronic Banking (*e-banking*) 365
- Pendapatan Non Bunga 367
- Butuh Investasi Besar 367
- Layanan Pada Nasabah (*Customer service*) 368
- Front Line Office 369
- Liasson Officer 369
- Information Centre 369
- Salesman 370
- Servicing 370
- Adviser atau Konsultan 370
- Maintenance Customer 370
- Handling Complaint 370
- One Stop Banking 371
- Kualifikasi Personil *Customer service* 371
- Tugas dan Wewenang *Customer service* 371
- Tugas-tugas 371
- Wewenang 373
- Bentuk Layanan Jasa Giralisasi Bank Umum 374
- Permohonan Referensi Bank 374
- Permohonan Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (*Standing Instruction*) 374
- Permohonan Perubahan Tanda Tangan 374
- Permohonan Perubahan Pengiriman Salinan Rekening Koran 375
- Permohonan Pembatalan Pencairan Atau Pembayaran (*Stop Payment Order*) 375
- Permohonan Giralisasi 375
- Bab 9 Bank Perkreditan Rakyat 377**
- Sejarah Singkat BPR 377
- Pengertian BPR 378
- Fungsi Kegiatan Usaha BPR 378
- Larangan Kegiatan Usaha BPR 379
- Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR 379
- Ketentuan-ketentuan Pokok BPR 380
- Ketentuan Kelembagaan 380
- Pendirian BPR 380
- Kepemilikan BPR 380
- Kepengurusan BPR 381
- Mercer, Konsolidasi dan Akuisisi BPR 382
- Pembukaan Kantor 382
- Kegiatan Kus di Luar Kantor 383
- Pemindahan Alamat Kantor 383
- Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum 383
- Penutupan Sementara 384
- Perubahan Kegiatan Usaha 385
- Ketentuan Kehati-hatian 385
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) 385
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 385
- Aktiva Produktif 386
- Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 387
- Restrukturisasi Kredit 389
- Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) 389
- Ketentuan Tentang Tingkat Kesehatan BPR 390
- Ketentuan Exit Policy 390
- Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan 390
- Ketentuan Lain-lain 392
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan 392
- Laporan-laporan BPR 393

Laporan Bulanan	393	Tabungan Syariah	425
Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	394	Deposito Syariah	426
Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)	394	Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	432
Laporan Keuangan Publikasi	394	Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah	433
Laporan Pengaduan Nasabah	394	Prinsip Kehati-hatian Bank Umum Syariah	434
Laporan Rencana Kerja Dan Pelaksanaan Rencana Kerja	394	Ketentuan KPMI Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah	434
Laporan Keuangan Tahunan (LKT)	395	Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah	434
Laporan Struktur Kelompok Usaha	395	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Syariah	435
Laporan Lainnya	395	Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS	435
Arah Kebijakan Pengembangan BPR 2014	395	Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Syariah	436
1. Model Bisnis BPR	396	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS)	436
2. Mendorong Kerjasama Apex BPR	397	Kinerja Bank Umum Syariah	437
Pengembangan BPR	397	Industri perbankan syariah tetap meningkat dengan kinerja yang baik	437
Memperkuat Kelembagaan	398	Pertumbuhan bank umum syariah lebih cepat dibandingkan bank umum konvensional	437
Kredit MKM Terutama Untuk Tujuan Konsumsi	398	FDR Semakin Baik	437
Perkembangan Kredit BPR	400	Risiko Pembiayaan Menurun	438
Peningkatan Permodalan di Indonesia	403	Profitabilitas Meningkat	438
Penyebaran BPR di Seluruh Indonesia	404	Permodalan Tetap Memadai Meskipun Menurun	438
Perluasan Jaringan Kantor	406	Pembiayaan BUS didominasi UMKM	438
Peningkatan Kerjasama BPR dengan Bank Umum/ Lembaga Lain (Linkage Program)	408	Menindaklanjuti Implementasi UU Perbankan syariah	438
Meningkatkan Kualitas Pengaturan	409	Meningkatkan Kompetensi Pelaku dan Pengawas Perbankan	442
Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan	409	Meningkatkan Daya Saing Pasca Krisis Keuangan Global	442
Mendorong Kualitas Tata Kelola (Governance), Menajemen dan Operasional yang Sehat dan Profesional	412	Menyempurnakan Peraturan Mengenai Manajemen Risiko	443
Memberdayakan Infrastruktur Pendukung Industri BPR yang Efektif	413	Memperkuat Permodalan	443
Lembaga Apex	413	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian	443
Lembaga Sertifikasi Profesi	414	UU No. 42 Tahun 2009 tentang Amandemen UU PPN dan PPNBM: Tax Neutrality Bagi Keuangan Syariah Yang Memberikan Harapan Pertumbuhan	443
Meningkatkan Kapasitas BPR	414	Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah 2014	445
Mewujudkan Pemberdayaan dan Perlindungan Nasabah	415		
Penerapan KYC/AML BPR cukup baik.	415		
Bab 10 Bank Syariah	417		
Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia	417		
Prinsip Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah	420		
Prinsip Kegiatan Usaha UUS	422		
Produk Bank Syariah	424		
Giro Syariah	424		

Sejarah Perkembangan	498	Bagaimanakah Kita Mendapatkan Keuntungan Dari Stock Options?	522
Pengelolaan	499	Bab 13 Pasar Uang dan Pasar Valas	525
<i>Badan Pembina Pasar Modal</i>	499	Pengertian Dasar	525
<i>Badan Pengawas Pasar Modal</i>	500	Kebutuhan Adanya Pasar Uang	526
Pasar Perdana dan Sekunder	500	Tujuan dan Fungsi Pasar Uang	527
<i>Pasar Perdana (Primary Market)</i>	500	Jenis Transaksi di Pasar Uang	527
<i>Pasar Sekunder (Secondary Market)</i>	501	<i>Pasar Uang Antar Bank</i>	527
Pelaku Pasar Modal	501	<i>Sertifikat Bank Indonesia (SBI)</i>	528
<i>Emiten</i>	501	<i>Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)</i>	528
<i>Investor</i>	501	<i>Sertifikat Deposito</i>	528
<i>Penjamin/Emisi (Underwrite)</i>	501	<i>Pasar Valuta Asing</i>	528
<i>Agen Penjualan</i>	502	Pelaku di Pasar Uang	528
<i>Penanggung (Gurantor)</i>	502	Karakteristik Pasar Uang	528
<i>Wali Amanat (Trustee)</i>	502	Instrumen Pasar Uang	529
<i>Pialang/Broker</i>	502	<i>Sertifikat Bank Indonesia (SBI)</i>	529
<i>Biro Administrasi Efek (BAE)</i>	503	<i>Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)</i>	530
<i>Tempat Penitipan Harta</i>	503	<i>Sertifikat Deposito</i>	530
Praktek Manipulasi Harga Saham di Bursa Saham	504	<i>Commercial Paper</i>	530
Sekilas Tentang Reksadana	504	<i>Call Money</i>	530
Karakteristik Investor dan Industri Reksadana	508	<i>Repurchase Agreement</i>	530
Obligasi	511	<i>Banker's Acceptance</i>	530
<i>Dari Sisi Penerbit</i>	511	Indikator Pasar Uang	530
<i>Dari Sisi Hak Penukaran</i>	511	<i>Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (Rp)</i>	530
<i>Dari sisi Jaminan</i>	511	<i>Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank (Rp)</i>	531
Karakteristik Obligasi	512	<i>Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (US\$)</i>	531
Harga Obligasi	512	<i>Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank (US\$)</i>	531
Stock Options	513	<i>JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate)</i>	531
<i>Sejarah Singkat Dari Stock Options</i>	514	<i>Suku Bunga Deposito Rupiah (%/Th)</i>	531
<i>Call Dan Put Options</i>	515	<i>Suku Bunga Deposito US\$ (%/Th)</i>	531
<i>Spesifikasi Dari Kontrak Stock Options</i>	516	<i>Nilai Tukar Rupiah (Kurs)</i>	531
<i>Jenis Dari Opsi: Apakah Itu Adalah Call Option Atau Put Option</i>	517	<i>Suku Bunga Kredit</i>	531
<i>Pihak-Pihak Di Dalam Transaksi Stock Options</i>	517	<i>Inflasi</i>	531
<i>Jenis-Jenis Dari Stock Options</i>	517	<i>Indeks Harga Konsumen (IHK)</i>	531
<i>Gaya-Gaya Dari Stock Options</i>	518	<i>Sertifikat Bank Indonesia (SBI)</i>	532
<i>Keuntungan Daripada Perdagangan Stock Options</i>	518	Jenis-Jenis Risiko Investasi di Pasar Uang	532
<i>Keuntungan Dari Stock Options</i>	519	<i>Risiko Pasar (Interest Rate Risk),</i>	532
<i>Perlindungan Dari Stock Options</i>	520	<i>Risiko Reinvestment,</i>	532
<i>Kefleksibilitas Dari Stock Options</i>	521	<i>Risiko Gagal Bayar (Default Risk Atau Credit Risk),</i>	532
<i>Risiko Dari Stock Options</i>	521	<i>Risiko Inflasi (Risiko Daya Beli Atau Purchasing Power Risk),</i>	532
<i>Bagaimanakah Menentukan Harga Stock Options?</i>	521		

Risiko Politik	532	Spot Dan Swap	547
Marketability atau Liquidity Risk	532	Aktivitas Foreign Exchange dalam Business dan	
Kelebihan dan Kelemahan Pasar Uang	533	Tindakan Pengendalian oleh Pemerintahan	547
Kelebihan Pasar Uang	533	Arbitrage	548
Kelemahan/Risiko Pasar Uang	533	Trading Arbitrage	548
Surat Berharga	533	Interest Rate Arbitrage	548
Treasury Bills (T-Bills)	533	Investment Arbitrage	549
Commercial Paper	534	Campur Tangan Pemerintah dalam Pasar	549
Sertifikat Deposito Atau Negotiable Certificate Of		Exchange Control	549
Deposit (CD)	535	Market Operation	550
Banker's Acceptance (BA)	535	Risiko yang Dihadapi	550
Bill of Exchange	536	Faktor Fundamental	551
Repurchase Agreement (Repa)	536	Faktor Teknis	551
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	536	Faktor Psikologis	551
Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)	537	Kebijaksanaan Umum	552
Call Money (Interbank Call Money Market)	538	Strategi Petunjuk	553
Obligasi Negara Ritel (ORI)	538	Prosedur dan Pengendalian	554
Prosedur Investasi pada ORI	539	Proses Penetapan Limit dan Kewenangan Dealer	555
Mekanisme Pembayaran Kupon dan Pokok	539	Pertama	556
Pajak Obligasi Negara Ritel	539	Kedua	556
Kerahasiaan Data Pemilik	540	Ketiga	556
Penerbitan ORI-001 Tahun 2006	540	Keempat	556
Pasar Uang Internasional	541	Metode Penetapan Limit	557
Pasar Euro (Eurocurrency Market)	541	Atas Dasar Volume Open Position (Volume Based	
Karakteristik Eurocurrency Market	542	Limits)	557
Pasar Valuta Asing (Forex Market)	542	Atas Dasar Volatility (Volatility Based Limits)	
Pihak-Pihak Dalam Pasar Valas	543	558	
Pemerintah	544	Stop Loss Limit: Munagement Action Trigger	
Bank Sentral	544	(MAT)	559
Bank Internasional	544	Window Dressing Limit	559
Lembaga Keuangan Lainnya	544	Spesialisasi	560
Nasabah Besar dan Kecil	545	Eurobond Market	561
Tujuan Transaksi Valuta Asing	545	Posisi Valuta Asing	561
Komersial	545	Pengertian Posisi	561
Funding	545	Tujuan Posisi	561
Hedging	545		
Investasi	545		
Individu	545		
Market Making	545		
Position Taking	546		
Bentuk Kegiatan Perdagangan Pasar Forex	546	Bab 14 Sewa Guna Usaha 563	
Untuk Pembayaran Ekspor dan Impor	546	Pendahuluan	563
Perdagangan Foreign Exchange (Forex)	546	Manfaat Pembiayaan Sewa Guna Usaha	564
Forward Trading	547	Macam Sewa Guna Usaha	565
		Pihak-pihak Terkait (Kep. Menkeu No. 1169/	
		KMK.01/1991)	567
		Bentuk-bentuk Perusahaan Leasing	567
		Independent Lessor	567

<i>Captive Lessor</i>	367	Jenis-Jenis Anjak Piutang	578
<i>Lease Brokcer atau Package</i>	367	<i>Full Service Factoring</i>	578
Bentuk Pembiayaan <i>Leasing</i>	568	<i>Recourse Factoring</i>	578
<i>Financial Lease</i>	568	<i>Bulk Factoring</i>	579
<i>Leveraged Lease</i>	569	<i>Maturity Factoring</i>	579
<i>Cross Border Lease</i>	569	<i>Agency Factoring</i>	579
<i>Operating Lease</i>	570	<i>Invoice Factoring</i>	579
<i>Sales and Lease Back</i>	570	<i>Undisclosed Factoring</i>	579
Cara Pembayaran <i>Leasing</i>	571	Lima Aspek Klien Yang Dinilai Anjak Piutang	579
<i>Pembayaran di Muka</i>	571	Lima Aspek Anjak Piutang Yang Dinilai Klien	579
<i>Pembayaran di Belakang</i>	571	Kriteria Pemberian Fasilitas Anjak Piutang	580
<i>Finance Lease</i>	572	<i>Anjak Piutang</i>	580
<i>Persyaratan</i>	572	<i>Dengan Pembiayaan (Financing Service)</i>	581
<i>Masa Sewa Guna Usaha, Sekurang-kurangnya</i>	572	<i>Tanpa Pembiayaan (Non Financing)</i>	581
<i>Perpajakan</i>	572	<i>Jenis Kegiatan Anjak Piutang</i>	582
<i>Akuntansi</i>	572	<i>Anjak Piutang Factoring</i>	582
Keuntungan Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	572	Perkembangan Pembiayaan Anjak Piutang	582
Perbedaan <i>Leasing</i> dengan Perjanjian Lain	572	Bab 16 Modal Ventura	583
<i>Perbedaan Dengan Jual Beli</i>	572	Pengertian	583
<i>Perbedaan Dengan Sewa-menyewa</i>	573	Sejarah Modal Ventura	584
<i>Perbedaan Dengan Sewa Beli</i>	574	Sejarah Awal Mula Modal Ventura Modern	585
Perkembangan Pembiayaan Sewa Guna Usaha	574	Di Indonesia	585
Bab 15 Anjak Piutang	575	Sejarah Modal Ventura Di Indonesia	585
Latar Belakang Sejarah	575	Para Pihak Dalam Modal Ventura	586
Pengertian	575	<i>Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)</i>	586
Pihak-Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang	576	<i>Perusahaan Pasangan Usaha (Invertee Company)</i>	587
Mekanisme Kegiatan	576	<i>Penyandang Dana</i>	587
<i>Disclosed Factoring</i>	576	Kewajiban Para Pihak	588
<i>Undisclosed Factoring</i>	576	<i>Kewajiban Perusahaan Modal Ventura</i>	588
Penanggung Risiko Macet	576	<i>Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha</i>	588
<i>Recourse (With Recourse)</i>	576	Ketentuan-Ketentuan Dalam Modal Ventura	590
<i>Non recourse (Without Recourse)</i>	577	Kegiatan Usaha Modal Ventura	590
Jenis Anjak Piutang	577	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh PVMD	591
<i>Piutang Untuk Tagihan</i>	577	Manfaat Modal Ventura	592
<i>Piutang Untuk Promes</i>	577	<i>Bagi Perusahaan Pasangan Usaha</i>	592
Jasa-Jasa Anjak Piutang	577	<i>Bagi Perusahaan Modal Ventura</i>	592
Biaya-Biaya	578	Jenis Berdasarkan Cara Pemberian Bantuan Mekanisme	
<i>Service Charge</i>	578	Modal Ventura Dapat Dibedakan Menjadi:	592
<i>Discount Charge</i>	578	<i>Single Tier Approach</i>	592
Manfaat Bagi Supplier	578	<i>Two Tier Approach</i>	592
Ruang Lingkup Transaksi	578		
<i>Transaksi Dalam Negeri (Domestic)</i>	578		
<i>Transaksi Internasional</i>	578		

Berdasarkan Cara Penghimpunan Modal Ventura Dapat Dibedakan Menjadi Dua	592	<i>Kucica</i>	617
<i>Leverage Venture Capital</i>	593	<i>MULLA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)</i>	617
<i>Equity Venture Capital</i>	593	<i>Pegadaian G-Lab (Unit laboratorium Gemologi)</i>	619
Berdasarkan Kepemilikan, Perusahaan Modal Ventura Dapat Dibedakan Dalam Beberapa Jenis	593	<i>Pegakuan 24</i>	619
<i>Private Venture-Capital Company</i>	593	<i>Multi Payment Online (MPO)</i>	619
<i>Public Venture-Capital Company</i>	593	<i>Galeri</i>	619
<i>Bank Affiliate Venture-Capital Company</i>	593	<i>Mengatasi Masalah Tanpa Masalah</i>	622
<i>Conglomerate Venture-Capital Company</i>	594	<i>Unit Pelayanan Operasional</i>	622
Perbedaan Perusahaan Modal Ventura Dengan Lembaga Pembiayaan Dengan Pinjaman	594	<i>Jumlah Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Konvensional</i>	622
		<i>Jumlah Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Syariah</i>	623
Bab 17 Pegadaian 595		<i>Sumber Dana</i>	624
Pendahuluan	595	<i>Penyaluran Dana</i>	624
Pengertian Gadai	596	<i>Peningkatan Pelayanan</i>	625
Organisasi dan Tata Kerja	597	<i>Perkembangan Usaha</i>	625
Tugas dan Fungsi Pokok	598	<i>Pendapatan Usaha</i>	625
<i>Menejer Kantor Cabang</i>	599	<i>Beban usaha</i>	626
<i>Penaksir Barang Jaminan</i>	599	<i>Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih</i>	626
<i>Kasir</i>	599	<i>Laba Bersih</i>	626
<i>Penjaga Gudang</i>	599	<i>Rasio Rentabilitas, Profit Margin, Rasio Operasi, dan Rasio Produktivitas</i>	627
<i>Penyimpan Barang Jaminan Emas</i>	599	<i>Rasio Likuiditas dan Solvabilitas</i>	627
<i>Petugas Tata Usaha</i>	600	<i>Prosedur Memperoleh Pinjaman</i>	628
Kegiatan Usaha	600	<i>Prosedur Pengembalian Pinjaman</i>	629
<i>Pinjaman Usaha Gadai</i>	600	<i>Lelang Barang Jaminan</i>	629
<i>Usaha Syariah</i>	603	<i>Nasabah Utama</i>	630
Produk Unit Layanan Pembiayaan	605	<i>Sumber Daya Manusia</i>	630
<i>KCA (Kredit Cepat Aman)</i>	605	<i>Profil Sumber Daya Manusia</i>	630
<i>Krasida</i>	607	<i>Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	631
<i>Kreasi</i>	608	<i>Budaya Kerja Intan</i>	631
<i>Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)</i>	609	<i>Pelatihan dan Pengembangan</i>	632
<i>Kresna (Kredit Serba Guna)</i>	609		
<i>Kredit Kagum</i>	610		
<i>Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)</i>	611		
<i>Rahn</i>	611		
<i>Arrum</i>	614		
<i>Kredit Amanah</i>	615		
Produk Unit Layanan Jasa Lainnya	615	Bab 18 Asuransi 635	
<i>Jasa Taksiran</i>	615	<i>Fungsi Asuransi</i>	635
<i>Jasa Titipan</i>	616	<i>Pengalihan Risiko</i>	635
<i>Jasa Lelang</i>	616	<i>Penghimpunan Dana</i>	636
<i>Pegadaian Persewaan Gedung</i>	616	<i>Penyeimbangan Premi</i>	636
<i>Unit Gadai Efek</i>	616	<i>Tujuan Asuransi</i>	636
		<i>Pengertian Asuransi</i>	636
		<i>Sejarah Asuransi</i>	638
		<i>Penggolongan Asuransi</i>	638

Asuransi Jiwa (<i>Life Insurance</i>)	639	Peserta Dalam Program Dana Pensiun	674
Asuransi Kerugian	645	Dua Jenis Lembaga	674
Asuransi Sosial	648	Dana Pensiun Pemberi Kerja	675
Pilih Asuransi Kebongkaran untuk Jaminan Harta Benda	649	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	675
Asuransikan Sepeda Motor	650	luran Dana Pensiun	677
Asuransi Mobil yang Tepat	651	Tiga Asas Pengelolaan Dana Pensiun	678
Asuransi Rumah: Menguntungkankah?	653	Kebersamaan	678
Klat Mudah Asuransi Pendidikan	654	Keadilan	678
Asuransi Kesehatan	655	Kesederhanaan	678
BPJS Kesehatan	658	Manfaat Dana Pensiun	678
Sejarah Singkat BPJS Kesehatan	658	Manfaat Pensiun Normal	678
Kepesertaan Wajib	659	Manfaat Pensiun Dipercepat	678
Hak dan Kewajiban BPJS	659	Manfaat Pensiun Cacat	678
Hak BPJS	660	Manfaat Pensiun Ditunda	679
Usaha Penunjang Usaha Asuransi Yang Terdiri Dari:	661	Peserta Dana Pensiun	679
Reasuransi	661	Kewajiban Peserta	679
Pentingnya Asuransi	662	Hak Peserta	679
Manfaat Asuransi Sesuai Kebutuhan	663	Prosedur DP Lembaga Keuangan	679
Keuntungan	663	Karakteristik DPLK	681
Kerugian	663	Faktor Penghambat DPLK	682
Risiko Asuransi	664	Asuransi	682
Penggolongan Risiko	664	Kebijakan dan Peraturan	682
Menejemen Risiko	664	Pemusaran	682
Karakteristik Risiko yang Dapat Diasuransikan	664	Kompetitors	682
Polis Asuransi	665	Pendirian Dana Pensiun	683
Doktrin Asuransi	666	Pendiri Dana Pensiun	683
Pembinaan dan Pengawasan Industri		Kewajiban Pendiri	683
Perasuransian	666	Wewenang Pendiri	683
Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Memiliki Program Seruty Bond	667	Hak Pendiri	683
Bab 19 Dana Pensiun	669	Dewan Pengawas Dana Pensiun	683
Pengertian Dana Pensiun	670	Persyaratan Dewan Pengawas	683
Manfaat Dana Pensiun	670	Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas	684
Prinsip Penyelenggaraan Dana Pensiun	673	Kewajiban Dewan Pengawas	684
Prinsip Kejelasan Maksud dan Tujuan Program	673	Pengurus Dana Pensiun	684
Prinsip Independensi	673	Syarat Pengurus	684
Prinsip Akuntabilitas	673	Wewenang Pengurus	684
Prinsip Transparansi	673	Kewajiban Pengurus	685
Prinsip Perlindungan Terhadap Konsumen	673	Tanggung Jawab Pengurus	685
Prinsip Struktur Pengendalian Interen	674	Mitra Pendiri Dana Pensiun	686
Prinsip Kualifikasi Penyelenggara	674	Kewajiban Mitra Pendiri	686
		Hak Mitra Pendiri	686
		Pembentukan dan Pembubaran Dana Pensiun	686
		Proses Pembentukan Dana Pensiun	686
		Proses Pembubaran Dana Pensiun	689

Perkembangan Industri Dana Pensiun 691
Lima Tahun Pertama: Masa Pertumbuhan 691
Krisis Ekonomi dan Dampaknya terhadap Industri
Dana Pensiun 691
Industri Dana Pensiun: Sekarang dan ke Depan 692
Industri Dana Pensiun di Indonesia 693
Tata Kelola Dana Pensiun 693
Maksud dan Tujuan 694
Penyusunan Regulasi 694
Arah Regulasi 695
Tata Kelola Dana Pensiun 696
Road Map Industri Dana Pensiun: Arah ke Depan
Pengembangan Dana Pensiun di Indonesia 697
Meningkatkan Fleksibilitas Skema Dana
Pensiun 697
Meningkatkan Kepastian Hukum Penyelenggaraan
Dana Pensiun 697
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dana
Pensiun 698
Memperkuat Pengawasan Dana Pensiun 698
Tiga Jenis Program Dana Pensiun 698
Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), 700
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), 700
Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan
(PPBK) 700
Alternatif Program Pensiun Lain 700
Cash Balance Plan: 701
Floor-Offset Plan: 701
Money-Purchase Plan: 701
Target-Benefit Plan: 701
Investasi Dana Pensiun 702
Prospek Dana Pensiun 702

Bab 20 Keuangan Inklusif 705

Apa itu Keuangan Inklusif 705
Apa itu Keuangan Inklusif 706
Mengapa Perlu Keuangan Inklusif 706
Bagaimana Penerapan Keuangan Inklusif? 707
Siapa Saja Yang Menerapkan Keuangan Inklusif 707
Strategi Nasional Keuangan Inklusif 708
Peran Bank Indonesia 709
Indeks Keuangan Inklusif 710
Dimensi Akses 710
Dimensi Penggunaan 711

Program Keuangan Inklusif 712
Gerakan Indonesia Menabung (GIM) 712
Tabunganku 713
Layanan Keuangan Digital (LKD) 714
Financial Identity Number (FIN) 715
Sistem Informasi Bagi Petani & Nelayan (SIPN) 716
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pemerintah
(GTOP) 718
Remitansi 719

Daftar Pustaka 721

Indeks 727
